



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat pengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disebut UPTD. Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan kepada seseorang baik pelayanan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan masyarakat dalam rangka menunjang observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weakness, opportunities dan threats*);

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) UPTD Labkesda menyusun Renstra lima tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat [1], memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 3

Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPTD Labkesda.

Pasal 4

Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan strategi dan kebijakan yang dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode *SWOT*.

Pasal 5

Rencana program dan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Renstra, harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan;
- (2) Implementasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD.

Pasal 7

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI, MISI TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB V : RENCANA STRATEGIS
 - BAB IV : PENUTUP

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

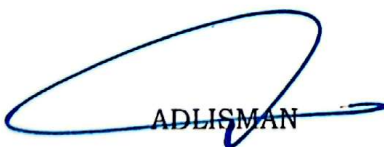
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2023-2027

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2027
DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Rencana Strategis.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	1
1.4 Landasan Hukum	2
1.5 Perubahan Rencana Strategis	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA	4
2.1. Gambaran Umum	4
2.1.1. Wilayah Kerja	4
2.1.2. Jenis Pelayanan	4
2.2. Gambaran Organisasi.....	5
2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	5
2.2.2. Sumber Daya	6
2.3. Kinerja Pelayanan	9
2.3.1. Pemeriksaan laboratorium	9
2.3.2. Kinerja aspek keuangan	10
2.3.3. Kinerja aspek sumber daya manusia (SDM)	11
2.3.4. Kinerja aspek sarana prasarana	12
2.3.5. Kinerja pemantapan mutu eksternal (PME)	12
2.3.6. Kinerja bimbingan teknis	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	15
3.1. Identifikasi Masalah.....	15
3.2. Isu Strategis (Rencana Pengembangan)	26
3.3. Rencana Pengembangan Layanan	26
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN	29
4.1. Visi	29
4.2. Misi	29
4.3. Tujuan, dan Sasaran.....	29
4.4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
BAB V RENCANA STRATEGIS	37
BAB VI PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Petugas Berdasarkan Status Kepegawain dan Kualifikasi Pendidikan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya Periode Juni 2022.....	7
Tabel 2.2	Plafon anggaran Tahun 2016-2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	7
Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2022 UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya	7
Tabel 2.4	Jenis peralatan yang tersedia Tahun 2022 UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya	8
Tabel 2.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2020	9
Tabel 2.6	Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	9
Tabel 2.7	Jumlah Pendapatan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	10
Tabel 2.8	Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	11
Tabel 2.9	Perolehan Sarana & Prasarana Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya ...	12
Tabel 2.10	Kegiatan PME yang Diikuti Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	13
Tabel 2.11	Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Daerah Kabupaten Dharmasraya	14
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran UPTD Labkesda 2023-2027 ...	31
Tabel 4.2	Analisis <i>SWOT</i>	33
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya 2023-2027	35
Tabel 5.1	Rencana program, krgiatan dan pendanaan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Realisasi Pemeriksaan Laboratorium Menurut Jenis Pemeriksaan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	10
Grafik 2.2	Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah	5
----------	---	---

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirbbil'alamiin, Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Watta'ala hanya karena petunjuk dan rahmatnya Renstra (Rencana Strategis) UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya 2023-2027 dapat diselesaikan. Renstra UPTD. Labkesda merupakan penjabaran pencapaian kinerja program untuk tahun 2023 sampai tahun 2027. Renstra ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan visi dan misi. Semua kegiatan program yang ada akan menjadi dasar dari evaluasi kinerja tahun 2023 sampai tahun 2027.

Renstra ini menggambarkan proyeksi target yang harus dicapai tahun 2023-2027 dengan menggunakan data pencapaian kinerja empat tahun terakhir. Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal sesuai dengan analisis SWOT, UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya berupaya dengan kekuatan yang ada pada faktor internal untuk meraih peluang yang ada pada faktor eksternal sehingga persyaratan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi. Dengan demikian UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi laboratorium kesehatan terdepan dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat serta pembinaan laboratorium puskesmas di Kabupaten Dharmasraya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

Dharmasraya, Desember 2023
Kepala UPTD Labkesda Kab. Dharmasraya

dr. Titi Suhartati, M.Biomed
Nip. 197709122006042015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Dharmasraya berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 18 tahun 2010. Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan laboratorium yang menjalankan fungsi pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Penyusunan rencana strategis UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala Labkesda.

1.2. Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis memuat antara lain:

- a. Rencana pengembangan layanan
- b. Strategi dan arah kebijakan
- c. Rencana program dan kegiatan
- d. Rencana keuangan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas, program dan kegiatan antara UPTD laboratorium kesehatan dengan dinas kesehatan kabupaten Dharmasraya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2027 adalah:

1. sebagai rencana dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya untuk mencapai visi dan misi.
2. sebagai pedoman terhadap penggunaan anggaran.
3. meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra UPTD. Labkesda yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 8 Desember 2004 Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2)
 15. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

1.5. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis UPTD. Labkesda ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis Unit Pelaksana Teknis sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggungjawab, dan kewenangan organisasi serta perubahan lingkungan.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 A. Gambaran Umum
 B. Gambaran Organisasi
 C. Kinerja Pelayanan
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 A. Identifikasi Masalah
 B. Isu Strategis
 C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
	A. Visi
	B. Misi
	C. Tujuan dan Sasaran
	D. Strategi dan arah kebijakan
BAB V	: RENCANA STRATEGIS
BAB VI	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Wilayah Kerja

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang cukup strategis karena berada di segitiga emas perbatasan tiga Provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Hal ini memungkinkan Kabupaten Dharmasraya untuk cepat berkembang baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi sosial budayanya. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 yaitu 3.025,99 km².

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari dan 260 jorong. Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi geografis 0°47'7"LS - 1°56"LS dan 101°09'21" BT - 101°54'27"BT yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan;

Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Koto Besar dengan luas 560,57 km² dan kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Sungai Rumbai dengan luas 51,06 km². Kecamatan yang paling jauh adalah kecamatan Asam Jujuhan dengan jarak 85 km dari ibukota kabupaten.

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 18 tahun 2010, dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Februari tahun 2010, terletak di pusat kabupaten dengan posisi 101°23'36"-101°36'40" BT dan 0°50'40"-1°10'40" di Jorong Koto Gadang KM 2 Sungai Dareh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan SK Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/83/KPTS-BUP/2021 tertanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Baru Labkesda Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan SK Bupati diatas gedung UPTD. Labkesda di realokasi pada area seluas 1500 m² yang saat ini sertifikatnya berstatus Hak Pakai nomor 06 atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dipergunakan untuk RSUD Sungai Dareh. Dengan alamat Jorong Kubang Gajah Nagari

Empat Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dengan Koordinat Lokasi S=0°57'03,2" E=101°29'57".

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sudah terakreditasi, dengan status terakreditasi penuh yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Tahun 2020.

2.1.2. Jenis Pelayanan

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya melakukan pelayanan untuk pemeriksaan sampel klinik maupun sampel kesehatan masyarakat. Kinerja pelayanan laboratorium dapat dilihat dari bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

Jenis pelayanan Labkesda Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

- a. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 - 1) Pemeriksaan Hematologi,
 - 2) Pemeriksaan Kimia Klinik,
 - 3) Pemeriksaan Serologi,
 - 4) Pemeriksaan Urinologi,
 - 5) Pemeriksaan Parasitologi,
 - 6) Pemeriksaan Bakteriologi,
 - 7) Pemeriksaan Narkotika dan Napza
- b. Layanan Pemeriksaan Laboratorium Kesmas
 - 1) Pemeriksaan Kimia Makanan,
 - 2) Pemeriksaan Bakteriologi Air,
 - 3) Pemeriksaan Kimia Air,
 - 4) Pemeriksaan Fisika Air

Pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan pada pasien baik yang datang sendiri, rujukan dari praktek dokter/klinik/pukesmas/RSUD /perusahaan baik yang sudah MOU maupun belum, calon jamaah haji, pasien prolans BPJS dan lainnya.

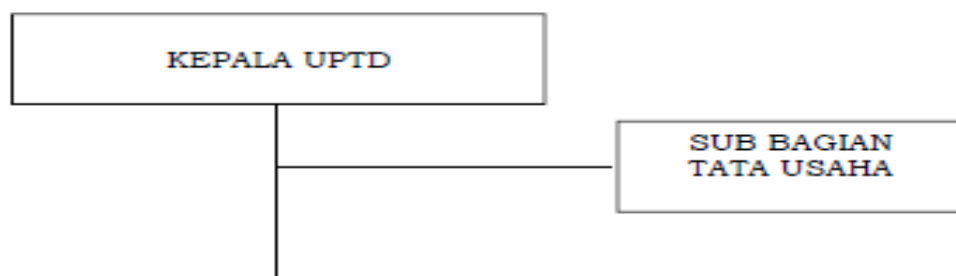
Pemeriksaan laboratorium kesmas sampel (berupa air, makanan, tanah, udara, bahan tambang dan bahan lainnya) berasal dari perorangan, depot air minum, Pamsimas, perusahaan dan rujukan dari instansi lainnya.

2.2. Gambaran Organisasi

2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu unit pelaksana teknis kelas A dinas kesehatan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Berikut gambar bagan struktur organisasi UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah



Berdasarkan gambar struktur organisasi UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya, dapat diuraikan tugas dan fungsi yang ada di UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

a. Kepala UPTD. Labkesda

- Menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.
- Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang laboratorium kesehatan daerah.
- Melaksanakan pelayanan teknis administrative ketatausahaan UPTD
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

- Merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
- Mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor.
- Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian keuangan, kepegawaian dan umum pada Dinas.
- Melaksanakan kegiatan penunjang operasional laboratorium kesehatan daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kepala UPTD. Labkesda dapat membagi sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian, dan dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior.

2.2.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya saat ini sudah memenuhi standar laboratorium daerah sesuai dengan Kepmenkes Nomor 1267 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tetapi untuk tenaga teknisnya sebagian besar masih berstatus non PNS. Berikut gambaran ketenagaan di UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya periode Juni 2022.

Tabel 2.1 Jumlah Petugas Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya Periode Juni 2022.

No.	Tenaga	Status Kepegawaian			Total
		PNS	Honor Daerah	Sukarela	
1.	S2 Master Biomedik	1	-	-	1
2.	Dokter	1	-	-	1
3.	S1	1	1	-	2
4.	D4 Analis	1	1	-	2
5.	D3 Analis/kesling	2	2	2	6
6.	SMA/sederajat	-	2	-	2
	Total	6	6	2	14

b. Sumber Daya Keuangan

Sebagai Unit pelaksana teknis dinas, UPTD. Labkesda dalam melaksanakan kegiatan operasional didukung anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Tabel dibawah ini menunjukkan plafon anggaran UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.2 Plafon anggaran Tahun 2016-2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

TAHUN	PLAFON ANGGARAN
2016	Rp. 285.061.000
2017	Rp. 516.969.876
2018	Rp. 666.480.602
2019	Rp. 1.022.358.655
2020	Rp. 560.074.395
2021	Rp. 573.000.000

Dari tabel diatas dapat dilihat komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penganggaran pada UPTD Laboratorium pada periode tahun 2016-2021, dan dapat dilihat tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.022.358.655 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

c. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya cukup lengkap dengan kondisi gedung baru di bangun tahun 2021. Pada tabel dibawah ini menggambarkan sarana yang dimiliki oleh UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.3. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2022 UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Gedung	1	1	-	-
2.	IPAL	1	1	-	-
3.	Genset	1	-	-	1
4.	Mobil Operasional	1	-	1	-

Sarana yang ada pada table diatas dilengkapi dengan Prasarana seperti peralatan yang tersedia. Berikut tabel jenis peralatan yang tersedia pada UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Tabel 2.4. Jenis peralatan yang tersedia Tahun 2022 UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

Kelompok Alat	Nama Alat	Jumlah Alat Yang Berfungsi	Merk / Type
Hematology, Blood Chemistry, and Immunology Equipment	Kimia Analyzer	1	Miura 200
	Hematology Analyzer 5 Diff	1	Dirui
	Urine analyzer	1	Cybow reader 300
	Sentrifus	1	Nf 400
	Hba1C	1	Wondfo
Microbiology Equipment	Analitical Balance	1	Soccores
	Autoclave Basah	1	GEA
	Petri Dish	4	Pyrex
	Inkubator	2	Memmert

	Mikroskop Binokuler	1	Olympus
Biological Molecullar Equipment	Automatic Extractor	1	Numerator
	Hotplate + Stirer	1	Heldoph
	RT-PCR	1	Exampler
Environment al Health Equipment			
	Pompa vakum	1	Chemcer 300
	Oven	1	Memmert inb-500
	Neraca timbang/Ana litical balance	1	Shimadzu
	Corong buchner	1	Pyrex
	Buret	2	Pyrex
	Erlenmeyer set	20	Pyrex
	Corong	2	Pyrex
	Turbiditimeter	1	Turbidimeter
	pH Meter Include Suhu	1	Lovibon water tes
	TDS Meter	1	Lovibon water tes
	Micropipet Set 10,100,200,1000	1	Soccorex
Toxicology/Chemistry Equipment	AAS (Flame dan Graphite Furnish)	1	ICE 3500
	Spektrofotometer UV Vis	1	Uv Vis Spectrohotometer
	Lemari Asam	1	Hamilton
	Refigerator Reagen	1	Refrigerator
	Refrigerator Showcase	1	Sharp

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan merupakan gambaran capaian kinerja pada periode sebelumnya, yaitu capaian kinerja selama tahun 2016-2021 dari beberapa aspek. UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan laboratorium kesehatan, untuk itu capaian kinerja pelayanan secara tidak langsung tergambar dalam capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Dharmasraya. Fokus aspek kinerja kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan adalah:

- **Usia harapan hidup**

Usia harapan hidup adalah perkiraan rata – rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM.

Perkembangannya selama 6 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan cukup relevan dengan kondisi yang ada, naiknya capaian AHH ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IPM kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari perkembangannya, kenaikan tertinggi adalah dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari 70,73 tahun menjadi 71,1 tahun.

Tabel 2.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2020.

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	70,16	70.30	70,44	70,73	71,1	71.33

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

2.3.1. Pemeriksaan laboratorium

UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan laboratorium yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Kinerja pelayanan laboratorium dapat dilihat dari jenis pelayanan yaitu pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Jumlah pemeriksaan yang dilakukan dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 di UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

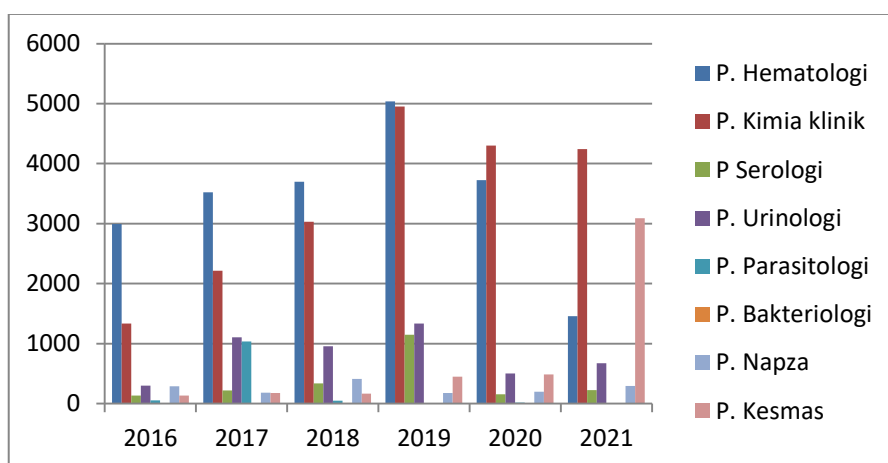
NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	LABORATORIUM KLINIK						
1	Pemeriksaan Hematologi	2991	3523	3699	5039	3724	1175
2	Pemeriksaan Kimia Klinik	1333	2215	3032	4953	4300	4240
3	Pemeriksaan Serologi	132	220	339	1149	156	224
4	Pemeriksaan Urinologi	298	1107	954	1333	500	603
5	Pemeriksaan Parasitologi	53	1034	47	6	16	0
6	Pemeriksaan	4	1	9	2	5	4

	Bakteriologi						
7	Pemeriksaan Napza	287	180	411	175	198	296
B	LABORATORIUM KESMAS	132	174	168	446	486	3090
	JUMLAH	5144	8454	8659	13103	9385	9632

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 2.6 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi trend peningkatan pada Tahun 2016-2019, dan pada Tahun 2020-2021 jumlah pemeriksaan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun terjadi trend peningkatan. Rendahnya jumlah pemeriksaan pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi Covid 19 dan tidak ada pemeriksaan calon Jemaah haji.

Perbandingan jumlah pemeriksaan laboratorium menurut jenis pemeriksaan dari Tahun 2016-2020 di UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1. Realisasi Pemeriksaan Laboratorium Menurut Jenis Pemeriksaan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.



2.3.2. Kinerja aspek keuangan

Apabila di lihat dari hasil pencapaian pendapatan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang bermakna, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 tentang Perkembangan Pendapatan Labkesda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sampai tahun 2021.

Tabel 2.7 Jumlah Pendapatan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH TARGET	JUMLAH PENDAPATAN	%
2016	Rp. 70.000.000	Rp. 70.546.500	100

2017	Rp. 85.168.000	Rp. 107.099.000	126
2018	Rp. 117.810.550	Rp. 118.023.500	100
2019	Rp. 200.000.000	Rp. 172.763.000	86,4
2020	Rp. 175.000.000	Rp. 136.235.000	77,8
2021	Rp. 175.000.000	Rp. 179.269.000	102,3

Pada tabel 2.7 terlihat bahwa jumlah target pendapatan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya terus meningkat pada tahun 2016-2019 dan pada periode ini jumlah pendapatan hanya pada tahun 2021 yang tidak mencapai target yaitu 86,4%. Pada tahun 2020-2021 target pendapatan sama yaitu sebesar Rp. 175.000.000 dan pada tahun 2020 yang tidak mencapai target yaitu 77,8%. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah.

2.3.3. Kinerja aspek sumber daya manusia (SDM)

Aspek kinerja UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya tidak hanya ditinjau dari aspek kinerja pelayanan dan keuangan, tetapi juga dilihat dari aspek sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia sangat menentukan kinerja organisasi. Berikut dapat dilihat perkembangan ketersediaan sumber daya manusia yang dimaksud berdasarkan tingkat pendidikan dan ketenagaan pada UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021.

Tabel 2.8 Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

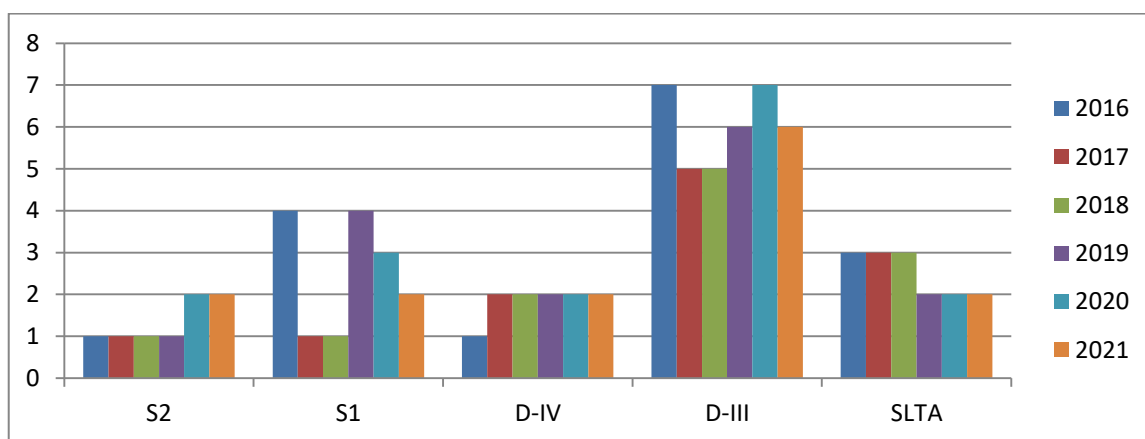
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH/TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PNS						
1	S2/Dokter	1	1	1	1	2	2
2	S1	-	-	-	2	1	1
3	D-IV	-	1	1	1	1	1
4	D-III	4	1	2	2	2	2
5	SLTA/Sederajat	1	1	-	-	-	-
	Jumlah tenaga PNS	6	4	4	6	6	6
B	THL						
1	S1	1	1	1	1	1	1
	D-III	-	-	1	1	1	2
	D-IV	-	-	1	1	1	1
2	SLTA/Sederajat	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Tenaga Honor	3	3	5	5	5	6
C	Tenaga Magang						
1	S1	3	-		1	-	-

2	D-IV	1	1	-	-	-	-
3	D-III	3	4	3	3	3	2
	Jumlah Tenaga Sukarela	7	5	3	4	3	2
	Total	16	12	12	15	14	14

Dari Tabel 2.8 tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang tersedia dimana dengan bertambahnya dokter diharapkan akan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif di UPTD Labkesda. Hal ini seiring dengan perkembangan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dalam berbagai aspek termasuk peningkatan jumlah pemeriksaan serta fungsi yang semakin kompleks.

Berikut ini Grafik Data Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 sampai 2021.

Grafik 2.2. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.



Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa komposisi jumlah pegawai dengan pendidikan DIII lebih besar dibandingkan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA/Sederajat. Dengan demikian, Labkesda Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi untuk lebih maju dan berkembang.

2.3.4. Kinerja aspek sarana prasarana

Dalam rangka peningkatan kinerja UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya, aspek sarana prasarana merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian, tanpa dukungan peralatan yang mencukupi maka kinerja pelayanan tidak dapat ditingkatkan. Sarana dan prasarana yang ada saat ini di UPTD Labkesda, dipandang perlu untuk peningkatan. Perkembangan perolehan sarana dan prasarana Labkesda Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.9. Perolehan Sarana & Prasarana Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021

1.	Peralatan Labor	Unit	17	4	7	2	10	0
2.	Peralatan Non Labor	Unit	20	8	7	-	14	0
3.	Gedung	Unit	-	-	-	-	-	1
	TOTAL	Unit	37	12	14	2	24	1

Dari Tabel 2.9. tersebut, dapat diketahui bahwa UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sejak awal berdiri sudah dibekali dengan alat laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan. Dari tahun ke tahun sarana dan prasarana laboratorium berangsur-angsur dipenuhi sesuai dengan standar alat yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Permenkes Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik.

2.3.5. Kinerja pemantapan mutu eksternal (PME)

Untuk menjaga mutu pemeriksaan laboratorium, UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya mengikuti kegiatan PME yang diadakan oleh Balai Besar Laboratorium Palembang.

Tabel 2.10 Kegiatan PME yang Diikuti Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya.

No	Jenis/ Bidang Pme	Hasil Penilaian/Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	LABORATORIUM KLINIK						
1	Mikrobiologi Mikroskopis BTA	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
2	Mikroskopis Malaria	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
3	Parasit Saluran Pencernaan	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
4	Imunologi parameter HBSAg	-	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
5	Imunologi parameter HIV	-	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
6	Hematologi	-	Telah	Telah	Telah	Telah	Telah

			diikuti	diikuti	diikuti	diikuti	diikuti
7	Kimia Klinik	-	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
8	Urinalisa	Telah diikuti	Telah diikuti	-	Telah diikuti	-	Telah diikuti
II	LABORATORIUM KESMAS						
1	Kimia Air	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti	Telah diikuti
		5	9	8	9	8	9

Kegiatan PME yang dilakukan di UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dianggarkan dan lakukan sejak tahun 2016. Pada tahun pertama, PME yang diikuti 4 (empat) jenis pemeriksaan yaitu Mikroskopis BTA, Malaria, Parasit Saluran Pencernaan dan Urinalisa dengan hasil semuanya baik. Pada tahun 2017 parameter pemeriksaan yang diikuti bertambah menjadi 8 (delapan) jenis pemeriksaan yaitu Mikroskopis BTA, Malaria, Parasit Saluran Pencernaan, HBSAg, HIV, Hematologi, Kimia Klinik dan Urinalisa. PME untuk pemeriksaan Mikroskopis BTA, Malaria, Parasit Saluran Pencernaan, HBSAg, HIV dengan hasil baik. Hasil PME untuk pemeriksaan Hematologi cukup karena saat dilakukan pemeriksaan PME raegen kontrol sudah habis 2 bulan dan sedang proses pengadaan barang. Untuk PME urinologi hasil tidak memuaskan karena alat rusak. Pada tahun 2018 hasil kimia klinik kurang memuaskan hal ini dikarenakan fotometer yang dipakai belum dikalibrasi, dan rencanakan untuk pengadaan alat pemeriksaan kimia klinik.

Sejak tahun 2018 PME untuk urinalisa tidak dilakukan karena alat urinalizer rusak. Hasil pemeriksaan lainnya baik. Pada 2019 hasil PME untuk pemeriksaan kimia klinik juga cukup. PME untuk pemeriksaan hematologi hasilnya memuaskan. Untuk pemeriksaan BTA, telur cacing dan malaria hasilnya kurang memuaskan. PME urin hasilnya cukup. PME untuk pemeriksaan HIV baik. PME untuk parameter kimia air memuaskan.

Pada 2020 hasil PME untuk pemeriksaan kimia klinik juga cukup. PME untuk pemeriksaan hematologi hasilnya memuaskan. Untuk pemeriksaan BTA, telur cacing dan malaria hasilnya kurang memuaskan. PME urin tidak diikuti karena alat urinalizer rusak. PME untuk pemeriksaan HIV baik. PME untuk pemeriksaan kimia air hasilnya memuaskan.

Pada 2021 hasil PME untuk pemeriksaan kimia klinik cukup. PME untuk pemeriksaan hematologi hasilnya memuaskan. Untuk pemeriksaan BTA, telur cacing memuaskan dan malaria hasilnya kurang memuaskan. PME urin baik. PME untuk pemeriksaan HIV baik. PME untuk pemeriksaan kimia air hasilnya cukup.

2.3.6. Kinerja bimbingan teknis

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya terhadap laboratorium puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya Bimbingan Teknis, terjalin kerjasama sesama jejaring laboratorium, peningkatan mutu sumber daya manusia dan membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas laboratorium puskesmas.

Bimbingan teknis yang telah dilakukan oleh UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya pada semua laboratorium puskesmas yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berikut kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.11. Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2016 sampai 2021 UPTD. Labkesda Daerah Kabupaten Dharmasraya.

NO	BINTEK LABORATORIUM PUSKESMAS	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kecamatan Pulau Punjung	2	2	2	2	2	2
2.	Kecamatan Sitiung	2	2	2	2	2	2
3.	Kecamatan Tiumang	1	1	1	1	1	1
4.	Kecamatan Koto Baru	1	1	1	1	1	1
5.	Kecamatan Sei Rumbai	1	1	1	1	1	1
6.	Kecamatan IX Koto	1	1	1	1	1	1
7.	Kecamatan Koto Besar	1	1	1	1	1	1
8.	Kecamatan Asam Jujuhan	1	1	1	1	1	1
9.	Kecamatan Padang Laweh	1	1	1	1	1	1
10	Kecamatan Timpeh	1	2	2	2	2	2
11.	Kecamatan Salak	1	1	1	1	1	1
	Total	13	14	14	14	14	14

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan pembangunan kesehatan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan kesehatan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya secara umum dalam melaksanakan kegiatan dan program kesehatan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut, antara lain adalah:

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Dharmasraya masih kurang dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pembangunan kesehatan.
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan masih terbatas untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat.
3. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar maupun rujukan belum merata
5. Tingkat pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terhadap pembangunan kesehatan masih kurang
- 6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat**
7. Rendahnya pengetahuan kesehatan dan perilaku hidup sehat
8. Informasi kesehatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal
9. Kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional masih rendah
10. Mutu manajemen perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi masih perlu ditingkatkan
11. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat masih rendah

UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, pelayanan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan pengelompokan permasalahan yang ada, permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bidang Kesehatan Masyarakat			
	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	Capaian 77.02 per 100.000 Kelahiran Hidup. Rendah dari target 230 per 100.000 Kelahiran hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya masyarakat yang memilih untuk melahirkan di selain tenaga atau fasilitas kesehatan sehingga meningkatkan resiko kematian ibu. - Anggaran yang belum memadai untuk penanggulangan resiko penurunan kematian pada ibu - Sistem rujukan yang belum efisien saat adanya persalinan komplikasi - Masih Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya peran serta masyarakat dalam aksi siaga bagi ibu yang akan bersalin - Nagari siaga sudah ada, tetapi masih ada yang tidak aktif dalam kesiagaan terhadap faktor resiko kematian 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta masyarakat di dalam Nagari Siaga - Peran aktif kader dan petugas kesehatan dalam mensosialisasikan pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan - Penganggaran dana yang cukup untuk pencegahan kematian ibu
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Capaian 9 per 1000 Kelahiran Hidup. Rendah dari target 20.6 per 100.000 Kelahiran hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi - Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta masyarakat dalam mendukung program penurunan angka kematian bayi - Penganggaran dana

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan kedaerah sulit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga kesehatan yang mendukung penurunan angka kematian bayi - Kurangnya Anggaran yang mendukung penurunan angka kematian bayi, sehingga pelayanan kesehatan kepada bayi belum maksimal. 	<p>untuk pencegahan kematian untuk bayi</p>
	<p>Angka Kematian Balita (AKABA)</p>	<p>Akaba adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan < 20 rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan kedaerah sulit. - Kurangnya tenaga kesehatan yang mendukung penurunan angka kematian balita - Kurangnya Anggaran yang mendukung penurunan angka kematian bayi, sehingga pelayanan kesehatan kepada balita belum maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	<p>Presentase persalinan di fasilitas kesehatan</p>	<p>Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran serta masyarakat di dalam Nagari Siaga - Kelengkapan sarana prasarana pendukung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	<p>kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan kedaerah sulit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga kesehatan di lapangan - Kurangnya sarana prasarana pendukung persalinan di fasilitas kesehatan - Kurangnya kompetensi petugas penolong persalinan - Kurangnya Anggaran yang mendukung program, sehingga pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin belum maksimal. - Verifikasi dan validasi data kurang optimal 	<p>pelaksanaan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edukasi masyarakat - Peran petugas, tokoh masyarakat dan kader kesehatan dalam mensosialisasikan pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan - Penganggaran dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan program
	Prevalensi Gizi Buruk	Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor.	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan ekonomi masyarakat menjadi unsur penting kejadian gizi buruk dalam masyarakat - kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya nutrisi bagi tumbuh kembang anak. - Penyakit bawaan dari balita 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Prevalensi stunting	Capaian 12.8%, rendah dari target nasional 24.1%	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tercukupinya asupan gizi anak, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan - kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya nutrisi bagi tumbuh kembang anak. - Asupan gizi saat anak masih di bawah usia 2 tahun tidak tercukupi. Entah itu tidak diberikan ASI eksklusif ataupun MPASI (makanan pendamping ASI) yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	Prevalensi Wasting (Balita Kurus)	Capaian 5.06%, rendah dari target nasional 9.5%	<ul style="list-style-type: none"> - Balita kurus disebabkan karena kekurangan makanan atau terkena penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat (masalah gizi akut) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Prevalensi Balita Gemuk	Capaian 2.5%, rendah dari target nasional 9.5%	<ul style="list-style-type: none"> - Balita Gemuk disebabkan karena kebiasaan pemberian makanan yang kurang baik, banyak makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. - Kondisi balita gemuk terjadi dalam waktu yang lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	Rumah Tangga PHBS	Capaian 27.5%, rendah dari target nasional 75%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih rendahnya kepedulian keluarga akan pentingnya PHBS untuk dilakukan dalam kehidupan sehari – hari - Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan program - Belum terimplementasinya PERDA rokok di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja - Edukasi masyarakat dan promosi kesehatan sosial

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Capaian 39%, rendah dari target nasional 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan masyarakat yang masih kuat untuk berperilaku Buang Air Besar di sungai - Regulasi yang ada di daerah baru surat edaran bupati sehingga kedepannya perlu di buat regulasi dalam bentuk Perda/Perbub - Kurangnya Anggaran Untuk Kegiatan Program - Masih sulitnya merubah perilaku masyarakat 	<p>media</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja - Edukasi masyarakat dan promosi kesehatan sosial media
2	Bidang Pelayanan Kesehatan SDM			
	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama	Rendahnya capaian akreditasi utama 21,4% (3 puskesmas dari 14 puskesmas)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya pendamping di tingkat kabupaten dalam mendampingi puskesmas menuju akreditasi utama - Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas tentang Akreditasi Puskesmas - Masih kurangnya komitmen puskesmas dalam melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			proses akreditasi - Masih Kurangnya Dukungan Alokasi dana untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas	kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	Visite Rate	Capaian visit rate 3.8, Rendah dari target 6	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi individu dan keluarga	- Peran aktif lintas sektor dalam pelaksanaan program - Peran serta aktif dari masyarakat - Kecukupan tenaga kesehatan - Kecukupan sarana prasara pendukung pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program
	Presentase Rumah Sakit Terakreditasi	Capaian 50%, rendah dari target 100%	- Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit - Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas tentang Akreditasi Rumah Sakit - Masih Kurangnya Dukungan Alokasi dana untuk Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit - Masih kurangnya kompetensi	- Kecukupan tenaga kesehatan - Sarana dan prasarana pendukung - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung kegiatan akreditasi agar memenuhi standar akreditasi - Peningkatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			petugas sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan	pengetahuan petugas tentang akreditasi
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Capaian 72%, rendah dari target 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada masyarakat kategori tidak mampu tapi belum menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). - Besaran iuran kepesertaan memberatkan peserta sedangkan fasilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah iuran yang dibayarkan - Masyarakat lebih memilih jaminan kesehatan konvensional karena dianggap lebih menguntungkan dan tidak memberatkan - Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di daerah terpencil - Data hasil validasi masih banyak yang tidak punya NIK dan tidak berdasarkan by name by address. - Masih terdapat Pekerja Swasta /masyarakat mampu yang belum terdaftar menjadi peserta PBI. - Verfikasi dan validasi data Keluarga miskin belum optimal dari sector terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja - Peningkatan verifikasi dan validasi data keluarga miskin menjadi kepesertaan PBI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CDR)	Capaian 83.7% rendah dari target 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan penemuan kasus TB baru, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang malu untuk ikut memeriksakan dahak setelah batuk lebih dari 1 bulan - Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi TB baru masih kurang - Kurangnya asupan gizi masyarakat - Masih menganggap penyakit TBC penyakit guna – guna - Pasien TBC yang berobat tidak sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja - Kepatuhan pasien TBC dalam pengobatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Capaian 100%, tercapai sesuai target 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada ditemukan penderita DBD yang menandakan masih kurangnya pengendalian terhadap penyakit menular - Masih ada lingkungan dalam masyarakat yang tidak memenuhi lingkungan sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				program yang mendukung kinerja
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Capaian 82.3% rendah dari target nasional 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada masyarakat yang tidak mau atau malu untuk melakukan tes HIV - Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pemeriksaan HIV kepada penduduk beresiko HIV, sehingga pemeriksaan belum kepada seluruh penduduk yang berisiko HIV - Masih adanya sikap diskriminatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun)	Capaian 26.7%, rendah dari target nasional 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum maksimalnya penjangkaran penderita Hipertensi melalui penemuan kasus secara aktif maupun secara pasif - Kurangnya alat pendukung penemuan kasus hipertensi seperti alat posbindu kit - Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan penjangkaran kasus hipertensi - Masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan bahaya hipertensi - Kurangnya tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			yang mampu melakukan penjangkauan dan penanganan penderita hipertensi	program yang mendukung kinerja
	cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun)	Capaian 81.8%, rendah dari target nasional 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan glukosa yang masih tinggi didalam masyarakat - Kurangnya anggaran yang mendukung penanganan penderita diabetes melitus - Kurangnya alat pendukung penemuan kasus Diabetes Melitus seperti alat posbindu kit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja
	cakupan imunisasi dasar lengkap	Capaian 46,2%, rendah dari target nasional 85%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada masyarakat yang meragukan ke-halalan imunisasi - Masih ada orang tua yang tidak memahami fungsi dan manfaat imunisasi - Masih ada masyarakat yang anti imunisasi karena alasan anak yang demam setelah imunisasi - Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) menambah kecemasan dan keresahan dalam masyarakat mengenai imunisasi - Kurangnya Akses petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>kesehatan di daerah terpencil dan sulit dikarenakan kondisi geografis maupun kendaraan dinas tidak mampu sampai ke pelosok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pandemic covid-19 sehingga masyarakat enggan fasilitas kesehatan 	<p>pelaksanaan program imunisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan promosi kesehatan melalui sosial media - Edukasi terhadap keluarga tentang imunisasi dimasa pandemic dengan menerapkan protocol kesehatan
	<p>cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk)</p> <p>cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa dan napza (per 1.000 penduduk)</p>	<p>Capaian 83,6%, rendah dari target nasional 100%</p> <p>Tingginya kasus gangguan jiwa dan penyalah gunaan Napza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap gangguan jiwa berat enggan untuk mengobati anggota keluarganya - Pihak keluarga ada yang memilih untuk memasung anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa berat dibanding melakukan pengobatan - Motivasi keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap gangguan jiwa enggan untuk mengobati anggota keluarganya - Rasa malu keluarga untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan - Peran serta aktif dari masyarakat - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan - Integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program yang mendukung kinerja - Penjaringan kasus napza dan alkohol di sekolah dan tempat – tempat berisiko - Peran serta aktif dari

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>melaporkan anggota keluarga mengalami gangguan jiwa ke tenaga kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan validasi data pengguna napza dan alkohol di masyarakat belum optimal 	<p>masyarakat dan tokoh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan tenaga kesehatan terlatih program jiwa - Penganggaran dana yang cukup dalam mendukung keberhasilan program - Peran aktif tenaga kesehatan, guru dan kader kesehatan - Kerjasama dengan kelompok LSM peduli kesehatan

3.2. Isu Strategis (Rencana Pengembangan)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang.

Adapun isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular
2. Belum tercapainya target peningkatan persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
3. Belum tercapainya target penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
4. Belum tercapainya target peningkatan persentase kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
5. Pelayanan kesehatan yang bermutu
6. Sanitasi lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
8. Pandemi Covid-19
9. Perencanaan dan Penganggaran

3.3. Rencana Pengembangan Layanan

Melalui isu strategis yang tersebut diatas, penyelarasan pengembangan UPTD Labkesda dengan mengimplementasikan BLUD dalam rencana pengembangan melalui analisis internal dan eksternal, adapun isu strategis adalah sebagai berikut :

1. *Related Diversification* (Keanekaragaman)

Keanekaragaman pelayanan pemeriksaan laboratorium pada UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari jenis layanan yang sudah dikembangkan. Pemeriksaan hematologi, kimia klinik, bakteriologi, urinalisis, parasitologi, serologi, narkotika, psikotropika dan bahan aditif (NAPZA) pada pelayanan Laboratorium klinik dan pemeriksaan fisik, kimia serta bakteriologi pada pelayanan Laboratorium telah didukung oleh tenaga kesehatan profesional yang berkompeten dibidangnya.

Keanekaragaman layanan pemeriksaan laboratorium dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan pelayanan laboratorium kesehatan yang lengkap.

2. *Market Development* (Pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya adalah dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui:

- a. Promosi melalui promosi langsung, leaflet , website dan lainnya
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak:

- 1) Laboratorium klinik
 - MOU dengan Puskesmas, Dokter Praktek Mandiri, Klinik, RSUD
 - MOU dengan BPJS Pemeriksaan pasien prolansis
 - Pemeriksaan haji
 - MOU dengan Perusahaan untuk pemeriksaan Hiperkes Tenaga Kerja
- 2) Laboratorium kesmas
 - MOU dengan Puskesmas untuk Depot Air Minum
 - MOU dengan Pamsimas
 - MOU dengan Laboratorium PU, DLH, Pangan dan Perusahaan (Pemeriksaan air, makanan, udara, tanah, bahan tambang dan lainnya)

3) *Product Development* (Pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil survey dengan para dokter dan klinik serta pemenuhan permintaan dengan pihak ke tiga melalui kerjasama dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis periksaan laboratorium akan akan dikembangkan baik alatnya maupun parameter pemeriksaannya antara lain:

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 - 1) Pemeriksaan Darah, kimla klinik, Serologi, Parasitologi, Bakteriologi, NAPZA, Pemeriksaan urine,
 - 2) Pemeriksaan HbA1C,
 - 3) Pemeriksaan covid 19
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesmas
 - 1) Pemeriksaan Fisika air
 - 2) Pemeriksaan Kimia air, makanan, tanah dan specimen lainnya
 - 3) Pemeriksaan Bakteriologi air
- c. Pemeriksaan Kesehatan lainnya
 - 1) Pemeriksaan kesehatan kerja meliputi spirometry, audiometri, organopospat dan pemeriksaan lainnya
 - 2) Pemeriksaan Medical cek up meliputi pemeriksaan laboratorium, rongent, USG dan lainnya
 - 3) Pemeriksaan laboratorium untuk mendukung program kesehatan Nasional seperti Penyakit menular (TB, Malaria dan lainnya), IVA, Pap smear dan lainnya.

Selain mengembangkan produk khusus, UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya akan mengembangkan home servis dan pengambilan sampel ke lokasi untuk pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan pengambilan sampel air untuk pemeriksaan laboratorium kesmas.

4) *Vertical Integration* (Integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Dharmasraya.

Dengan makin berkembangnya teknologi kesehatan, meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas, adanya transisi epidemiologi penyakit, diperlukan kegiatan yang dapat menentukan diagnosa penyakit secara pasti sehingga penanganan pasien dapat lebih cepat dan tepat maka peranan laboratorium kesehatan menjadi sangat penting.

Dengan lokasi UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya yang berada di pusat kabupaten merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan pemeriksaan laboratorium karena memiliki pangsa pasar yang beranekaragam. Rencana pengembangan program pelayanan pemeriksaan laboratorium UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2027 bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah kunjungan pemeriksaan laboratorium setiap tahunnya mengharuskan UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya untuk mencari Inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. Mengurangi waktu tunggu penerimaan hasil laboratorium dan pengiriman hasil laboratorium melalui WA dan email merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan, UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya membuka layanan untuk pemeriksaan jamaah haji, pemeriksaan medical cek up dan melayani pemeriksaan prolans pasien rujuk balik dengan bekerjasama dengan BPJS. Disamping itu dengan adanya alat baru pada laboratorium klinik dan kesmas, UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya sudah biasa melayani pemeriksaan covid 19 serta pemeriksaan kimia pada air, tanah dan makanan. Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan yaitu:

- a. Sistem Informasi Laboratorium (SIL) Kesehatan
- b. Menyediakan pemeriksaan laboratorium klinik untuk skrining penyakit gondok (T_3 T_4 , TSH, FT4, FT3), penyakit menular seksual (Tes non-treponema VDRL (Venereal Disease Research Laboratory dan tes TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay)
- c. Melengkapi pemeriksaan laboratorium kesmas untuk pemeriksaan air sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 untuk air minum dan Permenkes 32 tahun 2017 tentang pemeriksaan air bersih, air limbah dan pemeriksaan sampel makanan serta narkoba secara kuantitatif.
- d. Menyediakan pemeriksaan hiperkes untuk karyawan perusahaan perkebunan.

4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Dengan beroperasinya UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya di gedung yang baru setahap demi setahap UPTD Labkesda sudah mulai dilengkapi kebutuhan sarana dan prasarananya. Kebutuhan akan sarana dan prasarana ini akan terus meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi laboratorium dan peningkatan kunjungan pemeriksaan laboratorium. Dengan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) memudahkan pelanggan dan petugas dalam indentifikasi sampel sehingga meminimalisasikan tertukarnya sampel. Ruang tunggu yang luas dan nyaman dilengkapi dengan kursi untuk orang berkebutuhan khusus membuat pasien nyaman menunggu.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi:

- a. Pemasangan SIL (Sistem Informasi laboratorium)
- b. Sistem drainase lahan di sekitar lingkungan
- c. Pembuatan pagar yang menentukan batas tanah
- d. Pengerasan dan penimbunan lahan di depan, samping kiri dan kanan sehingga tidak tergenang air
- e. Penyediaan peralatan laboratorium untuk pengembangan pemeriksaan.

5. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan peningkatan jumlah pemeriksaan laboratorium klinik dan peningkatan penerimaan sampel laboratorium kesmas maka UPTD. Labkesda Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan tenaga dokter spesialis patologi klinik, analisis untuk laboratorium klinik dan laboratorium kesmas.
- b. Pelatihan untuk analisis laboratorium klinik dan laboratorium kesmas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi

Berpedoman pada visi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 yaitu: “KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU DAN BERBUDAYA” maka Visi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU
YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA”**

Maju :

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan social yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri :

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan public yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daderah secara optimal

Berbudaya :

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. misi kepala daerah disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. misi RPJM Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur .
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai – nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti tertuang pada misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya yang kedua yaitu **“Meningkatkan kualitas sumberdaya Manusia”**.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Dharmasraya dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pernyataan tujuan dan sasaran UPTD Labkesda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran UPTD Labkesda 2023-2027

Misi RPJMD : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Bidang Urusan : Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target				
							2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)			Tahun	71,69	71,87	72,05	72,24	72,42	N/A
			1	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan Labkesda	Indeks kepuasan pelanggan	Indeks	81	82	83	83	83
				Persentase pengelolaan limbah padat	%	100	100	100	100	100	100
				Status akreditasi laboratorium	Status	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi
				Jumlah parameter pemeriksaan laboratorium Klinik	Jumlah	54	54	55	55	56	57

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target					
							2023	2024	2025	2026	2027	
				Jumlah parameter pemeriksaan laboratorium Kesmas	Jumlah	32	34	34	34	34	34	
				Jumlah kemitraan	Jumlah	5	10	11	12	13	14	
			2	Peningkatan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan	%	248.61 4.350	10	10	10	10	10

Dari table di atas dapat dilihat Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis UPTD Labkesda Tahun 2023-2027 ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti tertuang pada misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya yang kedua yaitu **“Meningkatkan kualitas sumberdaya Manusia”**. Untuk mewujudkan indikator tujuan tersebut, UPTD Labkesda mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama serta target yang sudah dirumuskan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan 2021-2026.

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode *SWOT* pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Analisis *SWOT*

Faktor Internal	Kekuatan / Strength (S)	Kelemahan/Weakness (W)
	<p>a. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan laboratorim diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya <p>b. Adanya sitem manajemen yang berlaku (Sudah terakreditasi KALK)</p> <p>c. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh petugas</p> <p>d. Terdapat sumber anggaran dalam pelaksanaan operasional.</p> <p>e. Mempunyai alat yang sesuai dengan standar laboratorium pratama.</p> <p>f. Adanya sarana yang memadai (gedung, mobil operasional,IPAL)</p> <p>g. SDM yang sesuai dengan standar laboratorium pratama.</p> <p>h. Mempunyai sistem jaminan mutu</p> <p>i. Tersedianya berbagai jenis pemeriksaan laboratorium</p> <p>j. Tarif yang terjangkau oleh masyarakat umum.</p>	<p>a. Kerjasama/promosi ke mitra pengguna jasa laboratorium belum maksimal (marketing belum berjalan maksimal)</p> <p>b. SDM laboratorim yang PNS masih terbatas dan minimnya pelatihan.</p> <p>c. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah dipenuhi.</p> <p>d. Terbatasnya dana pelatihan untuk SDM</p> <p>e. Keterbatasan anggaran operasional (listrik, internet, kebersihan)</p> <p>f. Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana (gedung, modil, IPAL)</p> <p>g. Pengelolaan limbah masih menggunakan pihak swasta</p> <p>h. Biaya perawatan alat cukup tinggi</p> <p>i. Sistem Informasi Laboratorium (SIL) Kesehatan belum ada.</p> <p>j. Rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai non ASN</p> <p>k. Pemeriksaan penyakit potensial wabah dan survailen belum terkoordinasi dengan baik.</p> <p>l. Perda tarif sangat murah</p>

Faktor Eksternal		
Peluang/Oportunity	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<p>a. Terdapat dukungan kebijakan dari Dinkes.</p> <p>b. Tingginya peluang untuk kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta seperti klinik dan perusahaan.</p> <p>c. Tidak ada saingan laboratorium yang berarti.</p> <p>d. Lokasi Labkesda yang strategis.</p> <p>e. Peran positif Labkesda dengan jejaring pelayanan laboratorium.</p> <p>f. Tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi.</p>	<p>a. Peran positif Labkesda dengan jejaring pelayanan laboratorium.</p> <p>b. Menyediakan pemeriksaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan perkebunan.</p>	<p>a. Meningkatkan peran aktif laboratorium dalam pelayanan dan promosi pemeriksaan laboratorium kesehatan dengan instansi pemerintah dan swasta seperti klinik dan perusahaan serta masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kemampuan SDM laboratorium dalam memberikan pelayanan dan melakukan pemeriksaan laboratorium.</p> <p>c. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran laboratorium berbasis kebutuhan pemeriksaan dan kinerja.</p> <p>d. Pelaksanaan manajemen laboratorium kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium Pratama dan SOP</p>

Ancaman/Threat	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
<p>a. Kurangnya tingkat kepercayaan beberapa mitra pengguna jasa laboratorium</p> <p>b. Dana Operasional laboratorium yang terbatas.</p> <p>c. Kenaikan harga kebutuhan laboratorium.</p> <p>d. Jejaring kemitra dengan berbagai pihak termasuk praktisi dokter dan klinik swasta belum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kepercayaan mitra pengguna jasa laboratorium. - Pengalokasikan dana operasional sesuai kebutuhan Laboratorium. - peningkatan hubungan dengan jejaring kemitraan dan sosialisasi pada mitra kerja dan masyarakat. - Menjalin kerjasama dengan Klinik 	<p>Terwujudnya marketing yang baik.</p> <p>Pengangkatan dan penyebaran tenaga kesehatan melalui analisa kebutuhan dan beban kerja.</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar laboratorium pratama.</p> <p>Sistem perencanaan matang sehingga perencanaan sesuai dengan kebutuhan, konsisten dan berkesinambungan.</p>

<p>optimal sehingga rujukan pemeriksaan laboratorium masih kurang.</p> <p>e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit secara mandiri.</p> <p>f. Kondisi geografis pada beberapa wilayah yang jauh menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium kesehatan</p> <p>g. Pemberian terapi pada pasien belum mengacu pada hasil laboratorium hanya berpedoman pada keluhan simptomatik</p> <p>h. Belum terintegrasinya sistem informasi laboratorium kesehatan</p>		
--	--	--

Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT diatas, UPTD Labkesda menentukan strategi dan arah kebijakan pada tabel sebagaiberikut :

Tabel. 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya 2023-2027.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan Labkesda	Meningkatkan pelayanan dengan menerapkan layanan minimal	Menjamin hasil pemeriksaan yang akurat
			Mengurangi waktu tunggu
			Pengelolaan limbah sesuai prosedur

	Meningkatkan mutu Laboratorium	Melaksanakan Akreditasi laboratorium
		Melaksanakan Pemantapan Mutu
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Peningkatan ketersediaan SPA dan terkalibrasi secara bertahap
	Meningkatkan cakupan layanan pemeriksaan laboratorium	Melaksanakan layanan pemeriksaan Laboratorium Klinik
		Melaksanakan layanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan masyarakat
		Peningkatan kemitraan layanan laboratorium melalui kerjasama.
Peningkatan BLUD	Optimalisasi pendapatan BLUD	Integrasi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan

BAB V

RENCANA STRATEGIS

Rencana program, kegiatan dan keuangan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya mengagendakan Program Pembangunan Pelayanan Kesehatan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2021-2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program UPTD Labkesda yang mengacu pada program prioritas Renstra Dinas Kesehatan tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya

C. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Misi RPJMD : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Bidang Urusan : Bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan (2022)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Pena nggu ng Jawa b	Lok asi	
						2023		2024		2025		2026		2027		Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	
Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat				Angka Harap an Hidup	71,69	71,87		72,05		72,24		72,42		N/A		N/A				

				Jumlah kemitraan	5	10		11		12		13		14		14					
	Peningkatan BLUD			Persentase peningkatan pendapatan	248.614.350	10,61		0,00		0,00		9,09		0		20,67					
		01	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan BLUD	N/A	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp1.425.000.00	UPT D Labkesda	Kab . Dharmasraya		
		01.2.10.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan BLUD	N/A	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp1.425.000.00				
		01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Peningkatan BLUD Labkesda	N/A	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp275.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp300.000.00	1	Rp1.425.000.00				
Total									Rp275.000.00		Rp275.000.00		Rp275.000.00		Rp300.000.00		Rp300.000.00		Rp1.425.000.00		

BAB VI PENUTUP

Renstra UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Labkesda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2027 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf.

Renstra UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Labkesda.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi labkesda selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Labkesda. Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Renstra Labkesda ini harus dijadikan acuan kerja di UPTD Labkesda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, dokumen tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan labkesda dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2027 ini, setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra UPTD Labkesda periode 2023-2027 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA